

DAYA SAING INDUSTRI INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN :MEA

Zulkarnain, SIP, M.Si

Indonesia to day ... 16th largest economy in the world, ... and Indonesia in 2030 ... 7th largest economy in the world, (McKinsey Global Institute, “The archipelago economy; Unleashing Indonesia’s potential”, September 2012).

Abstract

Liberalization of trade brings with it consequences in competition and gaining market potentials. MEA or Asean Economic Community as liberalization call for preparedness of Indonesia to compete. With the population of about 250 million people the country would be the target market of products coming across the Asean countries and beyond. When the industry of the country is prepared in MEA market covering 617.68 million people MEA would be the blessing for Indonesia and more people in the country would gain more benefits.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan globalisasi membuat suatu negara saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan memasarkan produk unggul negaranya, dalam hal ini negara-negara dunia melaksanakan pertukaran barang dan jasa dalam konteks perdagangan internasional. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang mengandalkan kelancaran arus pendapatan devisa dan kegiatan ekonominya yang berasal dari ekspor. Dalam zaman modern seperti sekarang ini hampir semua negara mengikuti proses pembangunan yang

*Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seri I Diskusi Publik “Menimbang Daya Saing Industri Indonesia dalam ASEAN Economic Community”, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) FISIP Universitas Nasional bekerjasama dengan Public Trust Institute, Sucofindo, Surveyor Indonesia dan SLI Komunika, pada 7 Mei 2015 di Ruang Seminar Selasar Lt. 3 Blok I Universitas Nasional, Jakarta.

** Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional.

menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggerak pertumbuhan ekonominya. Keberhasilan dalam meningkatkan ekspor juga mencerminkan peningkatan daya saing dan sekaligus merupakan jalan satu indikasi dari tumbuhnya dinamika positif dalam kewirausahaan suatu negara. Berdasarkan dari hal ini, peningkatan ekspor bukan lagi sekedar pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Memasarkan produk di luar negeri berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri, pasar luar negeri yang sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang mempunyai daya saing yang tinggi yang akan menang dalam persaingan dan berhasil mendapatkan pangsa pasar.

Dalam usaha untuk menciptakan daya saing maka perbaikan mutu produk ekspor perlu ditingkatkan, sehingga dapat menghindari adanya penolakan dari negara tujuan ekspor. Keberhasilan dalam perdagangan internasional suatu negara dapat dilihat dari daya saingnya, daya saing ini merupakan suatu konsep umum yang digunakan didalam ekonomi, yang merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar terhadap keberhasilannya dalam persaingan internasional. Daya saing telah menjadi kunci bagi perusahaan, negara maupun wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia.

Demikian halnya dengan Indonesia, tatkala memasuki perdagangan bebas ASEAN. Sebagaimana diketahui, pada Desember 2015 adalah momentum mulai diberlakukannya liberalisasi perdagangan di ASEAN melalui skim Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN, ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003, telah menyepakati 11 sektor-sektor industri prioritas yang akan diintegrasikan (*Priority Integrations Sectors/PIS*). Namun pada tahun 2006, seiring dengan pertemuan *High Level Task Force on AEC*, PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 sektor yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu 7 sektor barang industri dan 5 sektor jasa. Ketujuh sektor barang industri tersebut terdiri atas; produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik. (**Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, 2011**).

Keinginan ASEAN membentuk MEA didorong oleh munculnya dinamika perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal,

Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru dengan disokong oleh India dan China. Sedangkan secara internal kekuatan ekonomi ASEAN sampai tahun 2013 telah menghasilkan GDP sebesar US\$ 3,36 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Dan memiliki dukungan jumlah penduduk sebesar 617,68 juta orang. (www.dpr.go.id; **Humphrey Wangke,"Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" dalam *Info Singkat, Vol.VI, No.10/II/P3DI/Mei/2014***). MEA dicanangkan sebagai suatu model integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Ditinjau dari tujuan diberlakukannya, MEA merupakan realisasi dari keinginan yang tercantum dalam visi 2020 untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. Visi 2020 menyatakan, dalam pelaksanaan MEA negara-negara anggota harus memegang teguh prinsip pasar terbuka (*open market*), berorientasi keluar (*outward looking*), dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar (*market drive economy*) sesuai dengan ketentuan multilateral. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, ASEAN akan terbuka untuk perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan pekerja (*free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital and free flow of skilled labor*). Dengan demikian, kawasan ASEAN akan muncul sebagai pasar yang menggiurkan bagi para pelaku ekonomi, baik bagi negara, swasta, industri maupun daerah. Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia?

Sebelum memasuki penjelasan tentang industri Indonesia dalam pasar ASEAN/MEA, ada baiknya mengulas sekilas bagaimana sesungguhnya performa ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Menurut Kepala BPS Suryamin, sebagaimana diberitakan dalam **SindoNews.com, 15 April 2015**, ekspor Indonesia secara keseluruhan terus mengalami tren positif dengan adanya kenaikan sampai 12,63% dari Februari 2015. Suryamin menyampaikan bahwa **ekspor** Indonesia pada **Maret 2015** mencapai USD13,71 miliar atau sekitar **Rp177,75 triliun** (kurs12.965/USD), naik 12,63% dari Februari 2015. Suryamin menjelaskan, ekspor minyak mentah dan gas mengalami peningkatan secara *month to month*. "Ini bahan bakar mineral kita naik 23,61%, lemak minyak hewan nabati 8,9%. Mesin peralatan juga naik 9,9%. Kalau yang cukup tinggi itu di perhiasan dan permata sebesar 24,15%. ungkap Suryamin.

Namun demikian, meski banyak peningkatan di berbagai komoditi, jika dibanding Maret 2014, ekspor mengalami penurunan sebesar 9%. Untuk total ekspor Januari-Maret 2015, angkanya mencapai USD39,13 miliar, turun

11,67%. Begitu juga ekspor non migas Januari-Maret 2015 mencapai USD33,43 miliar turun 8,23%. Namun demikian meski terjadi penurunan, pangsa pasar terbesar ekspor non migas pada Maret 2015 Indonesia adalah Amerika Serikat. "Pangsa ekspor non migas Indonesia pada Maret 2015 tertinggi ke Amerika Serikat sebesar USD3,78 miliar dengan share 11,31%. Sedikit menurun dari tahun lalu, tapi ini karena Amerika Serikat membuktikan membaik ekonominya," imbuh Suryamin.

Kedua adalah ke Jepang yaitu USD3,56 miliar dengan share 10,66%. Ketiga ke China sebesar USD 3,13 miliar dengan share 9,37%. Sedangkan untuk ekspor ke ASEAN sebesar USD 6,84 miliar dengan share 20,46% dan Uni eropa sebesar USD 3,64 miliar dengan *share* 10,89%.

Selanjutnya BPS melalui Suryamin, juga menururkan nilai impor Indonesia. **Impor Indonesia** pada **Maret** 2015 mencapai USD12,58 miliar atau **naik 9,29%** dibanding Februari 2015. Kepala BPS Suryamin mengatakan, impor terjadi peningkatan secara *month to month* pada migas maupun nonmigas. Impor migas naik 31,89%, yakni dari USD 1,72 miliar menjadi USD 2,27 miliar. Ini terjadi karena kebutuhan kita meningkat. Untuk impor nonmigas naik secara *month to month* sebesar 5,32%. Angka ini jauh lebih rendah dari kenaikan ekspor non migas yang sebesar 12%. "Sedangkan untuk impor akumulasi dari Januari-Maret 2015 sebesar USD36,70 miliar, turun 15,10% dengan penurunan pada impor non migas sebesar USD30,60 miliar atau turun 5,05%, " imbuhnya.

Untuk *share* terbesar impor adalah mesin dan peralatan mekanik dengan capaian USD5,85 miliar dan mesin serta peralatan listik sebesar USD3,90 miliar. Untuk pangsa pasar terbesar impor non migas yang pertama, dari China sebesar USD7,46 miliar atau 24,37%, Kedua dari Jepang sebesar USD3,7 miliar dengan share 12,10%. Thailand menduduki peringkat ketiga dengan angka USD 2,13 miliar atau 6,97%. Sedangkan untuk impor nonmigas ke ASEAN sebesar USD5,45 miliar dengan sharenya 21,09%. Uni Eropa USD2,80 miliar dengan *share* 9,15%.

Kondisi aktual ekonomi Indonesia sebagaimana diungkap Kepala BPS tersebut di atas menunjukkan betapa ekspor Indonesia justeru kuat ke negara-negara di luar ASEAN dan lemah ke negara-negara ASEAN. Pengamat ekonomi Faisal Basri dalam sumber yang sama (**SindoNews.com, 23 Feburari 2015**) mengemukakan keheranannya "Tren negara ASEAN saat ini sesungguhnya adalah semakin menjauh dari Amerika, semkain menjauh dari Eropa, tapi mendekat ke Asia. Jadi pedagang inter Asia yang bermain di

kancah perdagangan," ujarnya dalam sebuah forum diskusi perdagangan di Kementerian Perdagangan, Jakarta. Indonesia, Faisal Basri melanjutkan, "malah sebaliknya yakni menjauh dari kawasan ASEAN, namun mendekat ke yang lebih jauh yaitu Eropa dan Amerika". Ini yang harus diubah. Jadi kita lihat di sini kenapa *direction of trade* ke ASEAN turun, tapi ke Amerika dan Eropa malah naik, ini aneh," kata Faisal. Melihat kondisi ini Lalu bagaimana sesungguhnya Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN?

Liberalisasi perdagangan mengandung konsekuensi tingkat persaingan akan semakin ketat dalam memperebutkan peluang dalam pasar MEA. Bila industri Indonesia tidak mampu bersaing di tataran ASEAN maka MEA akan menjadi musibah (*loss of opportunities*). Jika tidak mampu bersaing, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk lebih kurang 250 juta berpotensi dibanjiri produk-produk negara-negara lain di ASEAN atau bahkan dari luar ASEAN. Sebaliknya bila industri Indonesia mampu bersaing dalam pasar MEA yang terdiri dari 617,68 juta penduduk, maka MEA akan membawa berkah dan manfaat (*land of opportunities*) yang nyata bagi perekonomian nasional. Merebut peluang dengan meningkatkan daya saing industri adalah pilihan kata dan tindakan yang kiranya pas untuk dilakoni Indonesia terkait MEA akhir tahun 2015 ini.

Daya Saing Industri Indonesia

Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi di laksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada keraakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Selanjutnya, menurut *Organisation for Economic Cooperation dan Development* (OECD), sebagaimana tertera dalam sumbernya

www.oecd.org, daya saing (*competitiveness*) adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Tingkat daya saing ditentukan oleh keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dianggap sebagai keunggulan yang berasal dari faktor alamiah dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan keunggulan yang berasal dari faktor yang bersifat dapat dikembangkan (*acquired*).

Dalam sebuah tulisan Ragimun, seorang peneliti pada pusat kebijakan ekonomi makro Kemenkeu RI- yang berjudul “*Analisis daya saing karet dari produk karet Indonesia terhadap China*”, dijelaskan bahwa Selain dua faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* atau keunggulan daya saing berkelanjutan. Ini terutama dalam kerangka menghadapi tingkat persaingan global yang semakin lama menjadi semakin ketat/keras atau terjadinya *hyper competitive*. Analisis persaingan yang super ketat ini merupakan analisis yang menunjukkan bahwa pada akhirnya setiap negara akan dipaksa menentukan suatu strategi yang tepat, agar negara/perusahaan tersebut dapat tetap bertahan pada kondisi persaingan global yang sangat sulit. Strategi *SCA* berintikan upaya perencanaan dan kegiatan operasional yang terpadu, yang mengkaitkan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal agar tercapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang diinginkan. (www.kemenkeu.go.id).

Sebagaimana dilansir oleh *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015*, Indeks daya saing global (*Global Competitiveness Index/GCI*) Indonesia, kembali naik ke peringkat 34 dari 144 negara. Dari laporan-laporan *World Economic Forum* terdahulu tercatat, indeks daya saing global Indonesia sempat berada di peringkat 54 pada tahun 2009, lalu naik ke peringkat 44 pada tahun 2010. Namun, peringkat Indonesia kembali turun ke peringkat 46 pada tahun 2011 dan peringkat 50 pada tahun 2012, untuk selanjutnya kembali naik ke peringkat 38 pada tahun 2013, lalu naik lagi ke peringkat 34 pada tahun 2014. Posisi daya saing industri Indonesia pada peringkat 34 ini digolongkan dalam Negara-negara yang baru sampai tahap ketiga dari lima tahap pengembangan daya saing, yaitu: *efficiency driven* bersama 29 negara lainnya. Peringkat 5 besar dunia yang

telah diukur daya saingnya oleh World Economic Forum berturut-turut ditempati Swiss, Singapore, AS, Finlandia dan Jerman. (www.weforum.org).

World Economic Forum mendefinisikan daya saing sebagai kumpulan kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktifitas Negara. Setiap tahun *World Economic Forum* menerbitkan laporan pemeringkatan Negara dengan menggunakan indeks daya saing global atau *Global Competitiveness Index (GCI)*.

GCI merupakan ukuran daya saing setiap negara dengan menggunakan 126 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, pendidikan dasar dan kesehatan, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Lima pilar yang menempati peringkat tertinggi untuk Indonesia yaitu ukuran pasar (peringkat ke 15), inovasi (31), lingkungan makroekonomi (34), kecanggihan bisnis (34), dan pengembangan pasar keuangan. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki daya saing yang baik untuk aspek ekonomi. Lima pilar dengan peringkat yang terendah yaitu efisiensi pasar tenaga kerja (110), kesiapan teknologi (77), pendidikan dasar dan kesehatan (74), infrastruktur (56), dan kelembagaan (53).

Di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun demikian, posisi Indonesia ini masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.

Menurut Kepala BPS, Suryamin, sebagaimana tercantum dalam **Liputan6.com, Jakarta (16/3/2015)**, disebutkan bahwa diantara Negara-negara anggota ASEAN, Thailand merupakan ancaman terbesar Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Ini terlihat dari masih defisitnya neraca perdagangan Indonesia dibandingkan Thailand. Pada bulan Februari 2015 saja defisit neraca perdagangan kedua negara mencapai US\$ 337,8 juta. Suryamin menyebutkan, secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN mengalami surplus US\$ 221 juta. Di mana, dengan Singapura sebesar US\$ 120,2 juta, Malaysia sebesar US\$ 63,7 juta. Dan hanya dengan Thailand mengalami defisit.

Secara nasional, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2015 mengalami surplus US\$ 740 juta, dipicu surplus sektor migas sebesar US\$ 170 juta dan non migas US\$ 570 juta. Adapun nilai ekspor Indonesia Februari 2015 mencapai US\$ 12,29 miliar atau mengalami penurunan sebesar 7,99 persen dibanding ekspor Januari 2015. Demikian juga bila dibanding Februari 2014 mengalami penurunan sebesar 16,02 persen. Sedangkan impor non migas Februari 2015 mencapai US\$9,83 miliar atau turun 6,34 persen dibanding Januari 2015, sementara bila dibanding Februari 2014 turun 4,86 persen.

Antara Optimisme dan Pesimisme

Pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015 adalah fakta sosial, ekonomi dan politik yang sulit untuk dihindari. Itu artinya seluruh negara ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal. Selanjutnya, akan terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas antar-negara ASEAN. Presiden RI Jokowi dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia di Bandung, mengemukakan bahwa pengusaha Indonesia tidak perlu takut menghadapi MEA pada akhir tahun 2015 nanti, karena negara lain juga menganggap Indonesia sebagai momok menakutkan dalam MEA tersebut. Lebih lengkapnya Presiden RI Jokowi mengemukakan, “Semuanya (pengusaha) masih menerka dan meraba nanti seperti apa. Tapi, setelah saya bertemu pemimpin ASEAN (lain) ternyata mereka juga takut,” ungkapnya. Ketakutan tersebut, kata Jokowi, lantaran para pemimpin negara ASEAN juga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi pada MEA 2015 nanti.

Menurutnya, para pemimpin dan pengusaha ASEAN justru menjadikan Indonesia sebagai momok nomor satu. Hal itu lantaran jumlah penduduk Indonesia yang besar dan otomatis jumlah pengusaha pun paling banyak. “Mereka membayangkan begitu dibuka (MEA 2015), mereka akan diserbu oleh pengusaha yang banyak sekali (dari Indonesia),” bebarnya. Menurut Jokowi, kekuatan terbesar Indonesia terletak pada pengusaha muda yang saat ini tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Kan biasanya yang suka ‘nyerang’ anak muda, karena saya mengalami itu. Begitu dibuka pengusaha muda itu langsung lari kencang. Keberanian yang didahulukan, hitungan (untung-rugi) nomor dua,” ujarnya. Bahkan, Jokowi yang sempat tergabung dalam Hipmi pernah merasakan hal tersebut. “Saya pernah mengalami itu. Tidak apa-apa, kalau jatuh ya kita

bangun lagi. Jangan takut (negara ASEAN), yang lain sudah grogi,” tandasnya. (SindoNews.com, 12 Januari 2015).

Selain Presiden Jokowi, Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjennya, Nus Nuzulia Ishak terlihat begitu optimis memosisikan produk-produk Indonesia pada pasar bebas MEA mendatang, sebagaimana diberitakan dalam GatraNews, 30 April 2015. Meski ada beberapa sektor yang harus diperbaiki, kinerja ekspor nasional secara umum tetap positif. "*Kita optimis dengan pasar tunggal ASEAN. Kinerja ekspor untuk 12 sektor prioritas ke negara ASEAN tetap bagus,*" tegas Direktur Jenderal PEN Nus Nuzulia Ishak. Tak cuma optimis, Nus punya harapan besar untuk bisa melompat lebih tinggi. Pasalnya, produk Indonesia untuk 12 sektor itu memiliki daya saing di atas rata-rata. "*Kita memiliki daya saing yang cukup bagus. Produk ikan olahan, tekstil, alas kaki, dan industri agro bakal menjadi produk ekspor andalan Indonesia saat MEA. Di sektor ikan olahan, kita menguasai sekitar 30% pasar ASEAN,*" ujarnya. Selain itu, sektor yang juga menyumbang surplus untuk neraca perdagangan Indonesia di ASEAN misalnya furnitur, produk kesehatan, dan industri tekstil. "*Kita harus mempunyai daya saing untuk produk-produk itu,*" kata Nus optimis.

Optimisme tersebut memang beralasan. Berdasarkan data Kemendag RI sebagaimana juga tertera dalam GatraNews, 30 April 2015 itu, tercantum sejumlah produk industri yang menunjukkan angka-angka optimistik. Nilai ekspor industri ikan olahan Indonesia ke ASEAN pada tahun 2013 mencapai US\$ 402,7 juta, sementara nilai impornya hanya US\$ 16,8 juta sehingga surplus US\$ 385,9 juta. Pada periode Januari-Juni 2014, pencapaian ekspor ikan olahan adalah US\$ 166,7 juta, dan impor ikan olahan US\$ 8,8 juta. Secara total, ikan olahan menghasilkan surplus 157,9 juta sampai tengah tahun 2014.

Produk hasil hutan juga menyumbang surplus yang besar. Ekspor tahun 2013 ke kawasan ASEAN senilai US\$ 854,9 juta, dan impor US\$ 95,5 juta sehingga surplus US\$ 759,4 juta. Pada Semester I 2014 ini, ekspor US\$ 398,8 juta, dan impornya US\$ 53,8 juta alias surplus US\$ 345 juta.

Surplus juga terjadi pada ekspor industri tekstil. Tahun lalu, ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN tercatat sebesar US\$ 840,6 juta sementara nilai impor US\$ 833,2 juta, sehingga menghasilkan surplus tipis US\$ 7,4 juta. Hingga pertengahan tahun ini, industri tekstil kembali menyumbang surplus US\$ 39,3 juta karena ekspor US\$ 455,3 juta dan impornya US\$ 416 juta.

Selain surplus, beberapa sektor memang sedikit sempoyongan. Misalnya elektronik, otomotif, dan produk karet. Di tiga sektor ini, kinerja ekspor nasional sedikit drop alias defisit. *“Kalau itu bisa kita tekan, defisit neraca perdagangan kita bisa menurun signifikan,”* Nus mengungkapkan.

Di sektor industri otomotif, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN digencet Thailand. Pada 2013, nilai ekspor Indonesia hanya USD 2 miliar, sementara nilai impornya USD 3,4 miliar sehingga terjadi defisit USD 1,4 miliar. *“Kita defisit dari Thailand karena impor produk otomotif, itu defisitnya bukan main,”* keluh Nus. Namun demikian sektor otomotif perlahan mengalami kemajuan. Ekspor otomotif sampai tengah tahun 2014 sudah mengalami perbaikan. Ekspor meningkat 16,3% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi USD 1,1 miliar, dan impornya turun sampai 26% menjadi USD 1,4 miliar.

Di sektor industri elektronik, sepanjang 2013 nilai ekspor Indonesia ke ASEAN tampaknya belum bisa mengalahkan nilai impornya. Ekspor elektronik tercatat sebesar USD 3,2 miliar sementara nilai impornya USD 5,1 miliar. Tak pelak, terjadi defisit neraca perdagangan sebesar USD 1,9 miliar. Impor elektronik dari ASEAN kembali menekan neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juni 2014 karena impornya mencapai USD 2,7 miliar, sementara ekspor elektronik Indonesia ke ASEAN baru mencapai USD 1,6 miliar.

Perjalanan kinerja ekspor Indonesia sedikit mengalami turbulensi di sektor industri berbahan karet. Meski Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia, ekspor produk karet Indonesia ke kawasan ASEAN pada 2013 sebesar USD 443 juta, sedangkan impornya USD 461,4 juta sehingga terjadi defisit sebesar USD 18,4 juta. Data sementara Januari-Juni 2014, ekspor produk karet sebesar USD 191,5 juta dan impor USD 226,8 juta. Menurut Nus, ada sedikit kendala di sektor industri hilir. Produk karet misalnya. Indonesia masih banyak mengimpor. Padahal, Indonesia memiliki karet mentah dalam jumlah sangat berlimpah. *“Makanya kita harus genjot hilirisasi industri, jangan terlalu banyak ekspor raw material,”* ucapnya.

Selain dari pada itu suara-suara pesimistik juga turut mewarnai kesiapan Indonesia memasuki MEA 2015 nanti. Mari kita mulai dengan penjelasan umum tentang ekspor Indonesia dari Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebagaimana tertera dalam **SindoNews.com, 23 Februari 2015**. Secara terang-terangan Basri menyebut bahwa target

ekspor RI 300 % di bawah pemerintahan Jokowi memang dasarnya sudah tidak realistis. Bahkan dalam sebuah forum diskusi di Kemendag RI baru-baru ini, Basri menyebut target itu “sesat”. Lebih lengkapnya ia menyebutkan, “**target** Kementerian Perdagangan RI menaikkan nilai **ekspor** hingga 300 % **sesat**”. Hal ini dikatakan Faisal Basri bukan karena membenci Kemendag RI, melainkan sayang, termasuk kepada menterinya. Menurutnya, meski target tersebut sesuai nawacita Presiden Jokowi, namun hal itu tidak mungkin tercapai. Pasalnya nilai impor Indonesia masih sangat tinggi. "Saya bilang begini, karena saya sayang dengan Pak Menteri (Rachmat Gobel). Dan saya harus bilang bahwa nawacitanya sesat, kalau bisa Pak Gobel desak dan bilang ke Pak Presiden apa gunanya ekspor meningkat 300% tapi impor naik 5 kali lipat. Kalau ini sesat, ya pasti sesatlah negeri ini," ujarnya.

Faisal juga menjabarkan, dalam lima tahun terakhir negara yang mampu mendorong ekspornya secara maksimal adalah India yakni sebesar 74,5%. "Terus, kita mau 300% ? Sekali lagi ini mimpi, ayo stop bermimpi mari kita berpijak di dunia nyata ini," imbuhnya. Jika ingin meningkatkan ekspor, lanjut dia, setidaknya harus dilakukan peningkatan sektor produksi, baik dari kuantitas maupun kualitas. Produktivitas juga dapat menjadi parameter bagi potensi peningkatan ekspor. Namun anehnya, selama ini sektor produksi Indonesia sudah menurun. Bahkan mulai beralih ke sektor jasa. "Dalam enam tahun terakhir ini turun terus produksi kita, produksi kita ke jasa. Jasanya makin tidak kompetitif, misalnya penerbangan, lihat saja Lion Air dan peristiwa kemarin itu," terang Faisal.

Karena itu, Basri menghimbau kepada Rachmat Gobel agar tidak menjadikan Nawacita sebagai pondasi untuk menentukan target yang tidak realistis. "Seolah-olah Nawacita ini seperti kitab suci. Ini bukan kitab suci, ini produk politik yang belum tentu benar," pungkasnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulistio pada awal tahun 2013 yang lalu termasuk salah satu yang meragukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean (AEC) itu. Menurutnya, pemerintah dan kalangan dunia usaha belum terlihat berupaya mengintegrasikan program untuk persiapan ke arah AEC hingga saat ini. Untuk menghadapi AEC, Kadin berharap adanya keterlibatan integratif dalam pembuatan kebijakan pemerintah, seperti yang sudah dilakukan negara-negara Asean lain, di antaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Dalam hal ini, Indonesia masih harus berbenah karena sektor swasta masih jauh berada di luar lingkaran pengambilan keputusan oleh negara," ujar

Suryo di Jakarta beberapawaktu lalu. Indonesia harus serius mempersiapkan diri menghadapi AEC akhir 2015. Apalagi, Indonesia merupakan pasar terbesar—dengan potensi penduduk lebih dari 240 juta jiwa—dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemerintah boleh saja berbesar hati dan bangga dengan pertumbuhan industri yang terbilang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, biaya logistik yang terlampau mahal serta buruknya infrastruktur membuat industri nasional “gugup” menghadapi AEC 2015. “Kami merasa gugup untuk menghadapi implementasi AEC 2015 yang waktunya kurang dari 2 tahun. Dari total populasi penduduk Asean sebanyak 600 juta, penduduk di Indonesia mencapai 250 juta. Kalau tidak siap, Indonesia hanya akan menjadi pasar saja. Mahalnya biaya logistik serta minimnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara kompetitor di kawasan ASEAN. Di Indonesia, biaya logistik saat ini rata-rata masih 16% dari total biaya produksi. Adapun normalnya maksimal hanya 9%-10%, jika tidak diperbaiki nanti Indonesia hanya menjadi penonton. (**Media Industri, No. 02.2013 :7**).

Pada bagian lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi pada awal tahun 2013 yang lalu pernah juga menyampaikan bahwa “Seberapa jauh kita bisa mempersiapkan diri dalam dua tahun ini sehingga kita bisa diuntungkan oleh adanya AEC. Dua tahun ini sangat mendesak dan tidak lama lagi. Kita harus hati-hati dan jangan sibuk dengan urusan yang lain lagi,” kata Sofjan. Menurutnya, pemerintah harus bisa membenahi sejumlah hal utama seperti *high cost economy* dan kondisi infrastruktur, demi kepentingan nasional. “Maka dari itu, AEC ini jangan dipaksakan kalau kita tidak bisa menghadapinya. Lebih baik menunda dari pada buru-buru,” tegasnya. Sofjan menilai, pemerintah dan dunia usaha Indonesia belum mampu menghadapi AEC. Pasalnya, kata dia, pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha. Pemerintah, lanjutnya, belum memberikan kebijakan yang bisa meringankan pengusaha, baik pemberian insentif maupun besaran bea keluar untuk sejumlah komoditas ekspor. Ia menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif kepada industri dalam negeri. Insentif yang dimaksud, kata Sofjan, juga menjadi proteksi untuk produk dalam negeri dalam bentuk kebijakan kebijakan yang ditujukan untuk semua sektor industri nasional. “Proteksinya tidak secara langsung karena

akan melanggar WTO. Caranya dengan memberikan insentif kepada industri,”ucapnya. (**Media Industri, No.02.2013 : 58-59**).

Mengukur Kesiapan Indonesia dan Beberapa Catatan Penting

MEA 2015 tidak mungkin untuk dihindari dan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi saat ini dituntut untuk bekerja keras bagaimana meningkatkan daya saing industri tersebut sehingga memberi manfaat dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sekaligus memajukan ekonomi nasional. Tentu ini bukanlah pekerjaan mudah. Diperlukan sejumlah strategi tertentu baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah, agar MEA 2015 membawa berkah bagi Indonesia. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK telah mencanangkan program Nawacita yang berisi sembilan agenda prioritas. Salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi nasional. Pemerintahan baru ini juga memprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Prioritas ini sudah barang tentu memiliki titik berat dan keterkaitan dengan kesiapan Indonesia menghadapi persaingan di MEA 2015.

Catatan 1,

Penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5%. Sementara *scorecard* rata-rata ASEAN dalam pencapaian MEA adalah 82,1 persen.

Sungguh membanggakan, Indonesia ternyata sudah siap 85,5 % memasuki pasar bebas MEA 2015. Melalui Kementerian Koordinator Perekonomian RI, sebagaimana dimuat dalam **SindoNews.com 16 Desember 2014**, mengemukakan saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai **persiapan** penting dalam menghadapi persaingan usaha Masyarakat Ekonomi ASEAN (**MEA**) 2015. Hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru MEA Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5%. Sementara *scorecard* rata-rata ASEAN dalam pencapaian MEA adalah 82,1 persen. Kementerian Koordinator Perekonomian melalui salah seorang pejabatnya, Rizal Edwin mengemukakan, Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan

barang dan jasa, serta investasi. Kini, Indonesia dalam proses meratifikasi 23 perjanjian terkait perdagangan jasa.

Menurutnya, upaya koordinasi di seluruh lini telah pula dilakukan sebagai persiapan Indonesia menangkap peluang MEA 2015. Presiden RI Jokowi dan Menko Perekonomian telah secara rutin melakukan pertemuan koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia untuk memantapkan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Kemenko Perekonomian juga sudah menyusun Road Map Daya Saing Nasional. Selain itu, Bank Indonesia telah meluncurkan program keuangan inklusif untuk meningkatkan akses UKM terhadap permodalan perbankan.

Di sisi lain, Kementerian Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Kadin Indonesia terus meningkatkan sosialisasi mengenai Masyarakat ASEAN terhadap masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk seminar tentang masyarakat ASEAN ke berbagai daerah, kuliah umum di sejumlah kampus, penerbitan majalah, menggelar media briefing, serta membentuk pusat studi ASEAN di sejumlah universitas.

Catatan 2, Indonesia cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibanding negara lain yang tergabung dalam MEA. Akibatnya harga produk-produk Indonesia lebih tinggi. Inflasi yang tinggi pengaruhi daya saing produk yang dihasilkan jika dibandingkan dengan produk negara-negara MEA lain yang biaya produksinya rendah.

Dalam sebuah berita yang dimuat **Jawapos.com, 30/04/15**, Gubernur BI Agus Martowardojo mengemukakan bahwa daya saing pasar Indonesia diprediksi belum mampu bersaing dengan sejumlah negara ASEAN dalam skema MEA 2015.

Indonesia cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibanding negara lainnya. Hal tersebut mengakibatkan harga produk-produk Indonesia lebih tinggi. "Inflasi yang tinggi pengaruhi daya saing produk yang dihasilkan jika dibandingkan dengan produk negara lain yang biaya produksinya rendah. Terlebih memasuki MEA," papar Agus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Jakarta.

Dia menguraikan, Indonesia harus mampu mengendalikan inflasinya hingga di bawah 5 persen. Padahal, tingkat inflasi negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Filipina lebih rendah di bawah angka tersebut. Angka inflasi di kisaran 5 persen tersebut akan membuat Indonesia sulit memenangkan persaingan pasar dengan negara-negara di kawasan ASEAN. "Inflasi di Indonesia tergolong masih lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN yang mampu di bawah 5 persen. Kita sebanding dengan Filipina. Tapi, justru inflasi Filipina dalam sepuluh tahun terakhir sudah mampu di bawah 5 persen," paparnya.

Mantan Menkeu tersebut memerinci, inflasi Indonesia pada 2013–2014 mencapai 8,3 persen. Per Maret 2015, secara *year-on-year*, inflasi Indonesia juga masih cukup tinggi, yakni 6,38 persen. Sementara itu, inflasi Filipina hanya 0,1 persen, sedangkan Thailand dan Singapura justru mengalami deflasi. Masing-masing 0,7 persen dan 0,9 persen.

Menurut Agus, tingginya inflasi di Indonesia dipicu gejolak harga pangan dan permasalahan struktural perekonomian yang masih sulit dikendalikan. Karena itu, dia menilai bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan untuk mencapai target inflasi 3,5 persen. Pengendalian inflasi tersebut tidak hanya dilakukan BI, tapi juga pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholder* terkait."Perlu kerja keras dengan kontribusi pemerintah daerah. Peran daerah sangat penting karena kontribusi inflasi daerah ke nasional sangat besar mencapai 80 persen terhadap inflasi nasional. Upaya pengendalian inflasi ini memang perlu *extra effort*. Harga barang dan jasa naik signifikan apabila terus-menerus berlangsung (inflasi)," imbuhnya.

Catatan 3, Tenaga kerja terampil yang berasal dari Indonesia dengan standar kompetensi ASEAN masih sangat minim

Sebagaimana diberitakan dalam **SindoNews.com, 14 November 2014**, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyatakan bahwa **insinyur** dalam negeri yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan **standar mutual recognition arrangements (MRA)** dan bersertifikasi **ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE)** masih **minim**. Ketua Umum PII Bobby Gafur Umar mengatakan hingga Agustus 2014, Indonesia baru memiliki 124 tenaga insinyur yang memenuhi standar kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan standar MRA, dan bersertifikasi ACPE.

Sementara insinyur di seluruh kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah berstandar MRA dan bersertifikasi ACPE banyak sekali,

mencapai 700 orang lebih, di dominasi Singapura dan Malaysia," kata Bobby. Hal ini menjadi tantangan insinyur dalam negeri dalam menghadapi pemberlakuan MEA. "Kita tidak perlu takut, tetapi memang harus lebih siap sebab jika tidak siap, bukan hanya hasil dan produk industri dalam negeri yang terancam, tapi penyedia jasa lokal pun akan gigit jari melihat lahan pekerjaan mereka dirampas tenaga asing," imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia dan para insinyur Indonesia harus siap menghadapi situasi ini. Bagi para insinyur Indonesia tidak mudah untuk menerima kenyataan ini, tapi harus dihadapi. Karena itu, harus benar-benar siap mengantisipasinya. Insinyur Indonesia harus memiliki daya saing lebih. Enam kriteria MRA adalah pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan, dan kode etik (*professional conduct*). Karena itu, Bobby mengimbau tenaga insinyur Indonesia untuk segera memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Catatan 4, Sebanyak 3,5 juta Industri Kecil Menengah (IKM) Indonesia akan bersaing dengan para pelaku pasar di ASEAN sekaligus membuka pintu untuk menjalin kerjasama dengan sesama pelaku bisnis di kawasan regional

Dalam hitungan bulan perekonomian Indonesia memasuki babak baru. yaitu pemberlakuan MEA pada akhir 2015. Sebanyak 3,5 juta **industri kecil** harus siap menghadapi **pasar bebas** di kawasan regional yang mesti menjadi peluang bagi pelaku usaha di Tanah Air. Tantangan ini menjadi kesempatan industri kecil menengah memperluas pasar ke regional," ujar Menteri Perindustrian RI Saleh Husin, sebagaimana dimuat dalam, **SindoNews.com 22 April 2015**. Dengan demikian perekonomian nasional nantinya akan bersaing dengan para pelaku pasar di kawasan ASEAN," ucapnya. Selain pemasaran, MEA juga membuka pintu bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menjalin kerja sama dengan sesama pelaku bisnis di kawasan regional.

Optimisme pemerintah juga mengacu pada kontribusi IKM sebesar 34,56 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan. "Kontribusi berkat dukungan lebih kurang 3,5 juta unit usaha, yang merupakan 90 persen dari total unit usaha industri nasional. Mereka harus siap bersaing hadapi MEA," ujar Menperin.

Jumlah unit usaha tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8,4 juta orang, yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Dirjen IKM Kemenperin RI Euis Saedah mengungkapkan strategi penguatan industri kecil menengah. Antara lain, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan IKM melalui pengembangan produk dan peningkatan kemampuan sentra, pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi. Selain itu, perluasan akses pasar melalui promosi dan pameran, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, fasilitasi sertifikasi mutu produk dan kemasan, serta fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Catatan 5,

Inefisiensi ekonomi masih menjadi momok menakutkan di dunia usaha. Dampaknya, biaya produksi di Tanah Air tidak mampu kompetitif bahkan dengan sesama negara ASEAN. Ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu oleh pungutan liar, mulai dari perizinan di birokrasi, proses produksi, distribusi, hingga *loading* di pelabuhan. Biaya logistik di Indonesia masih sangat mahal, bahkan menjadi yang paling mahal di ASEAN. Biaya logistik yang mahal ini jelas tidak efisien dan karena itu menjadikan industri di dalam negeri tidak memiliki daya saing.

Biaya logistik di Indonesia masih sangat mahal, bahkan menjadi yang paling mahal di ASEAN. Biaya logistik yang mahal ini jelas tidak efisien dan karena itu menjadikan industri di dalam negeri tidak memiliki daya saing. Kondisi ini terlihat dari survei yang dikeluarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tentang kinerja logistik di 11 negara. Hasilnya, Indonesia ditempatkan pada nomor yang paling buncit. Demikian ulasan berita yang dimuat dalam **BusinessReview, Mei 01, 2015**. Dalam hal indeks kinerja logistik, Indonesia mendapat skor 2,5, dalam skala 1-5, dimana skor 1 menunjukkan kinerja logistik yang paling rendah dan skor 5 untuk kinerja logistik yang terbaik. Untuk posisi puncak, dengan kinerja logistik paling baik, ditempati Singapura dengan skor 4,25. Kemudian diikuti Afrika Selatan, Malaysia, Cile, Thailand, Brasil, Meksiko, India, Filipina, Vietnam.

Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría mengungkapkan, hasil survei tersebut seharusnya bisa membuat pemerintah bisa membenahi masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala di sektor logistik. Menurut

Gurria, langkah pemerintah Jokowi dengan mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif yaitu pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan yang tepat. Ia mengatakan, buruknya infrastruktur Indonesia sangat menghambat distribusi logistik sehingga dapat mengganggu pertumbuhan.

Sebelumnya, survei Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara. “Harus diakui Indonesia memiliki kinerja yang paling buruk dalam beberapa sektor logistik, seperti layanan angkutan barang jalan raya dan layanan distribusi,” demikian hasil survei OECD sebagaimana diutarakan pada sumber yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, mengakui jika indeks kinerja logistik (*Logistic Performance Index-LPI*) Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Pada 2007, Indonesia berada urutan ke-43 dari 150 negara. Indroyono mengatakan, pada 2007 Singapura menjadi negara dengan kinerja logistik terbaik, yakni berada pada urutan pertama. Malaysia berada di urutan ke-27, sedangkan Thailand di urutan 31. Pada 2010, kata Indroyono, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil survei sebelumnya. “Tahun 2010 Indonesia justru turun ke urutan 75, Singapura 2, Malaysia 29, Thailand 35,”ujarnya. Namun, pada 2013 posisi Indonesia sedikit naik, namun hanya bertengger pada urutan ke-59 dari 150 negara. Salah satu hal yang membuat buruknya kinerja logistik Indonesia, katanya, yaitu lamanya bongkar muat di pelabuhan (*dwelling time*). “Tahun 2013 Malaysia urutan 21, Thailand urutan 52, Singapura urutan 1, salah satunya *dwelling time* itu,” ujar Indroyono masih dalam sumber yang sama. Pemerintah RI menyepakati memangkas *dwelling time* dari sekitar 8 hari menjadi 4,7 hari. Target ini diproyeksi bisa tercapai dalam waktu 3 bulan ke depan. “Jadi harapannya *dwelling time* bisa mencapai 4,7 hari, sekarang ini masih sekitar 8 hari. Jadi kita coba turunkan,”kata Indroyono. Ia mengatakan, untuk memangkas *dwelling time*, pihak-pihak yang berperan di pelabuhan telah sepakat melakukan percepatan proses pemeriksaan.

Penurunan *dwelling time* dibagi menjadi 3 kelompok yang bertanggung jawab yaitu tahap *pre custom clearance*, *custom clearance*, dan *post custom clearance*. “Untuk *pre custom clearance*, ada yang kaitannya dengan Kementerian Perdagangan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan

Makanan), Badan Karantina. Mereka sepakat memiliki sasaran untuk *pre custom clearance* 2,7 hari. Sedangkan untuk *custom* atau Bea Cukai harapannya setengah hari, sedangkan untuk *post custom clearance* sekitar 1,5 hari,” papar Indroyono. Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan akan membantu proses pengurusan dan penerbitan izin sehingga mampu mempercepat keluar masuk barang. “Jadi nanti Menhub akan siapkan *port authority* untuk memantau seperti apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perizinan dan pergerakan perizinan bisa dipantau secara *online*. Termasuk untuk sekiranya ada risiko-risiko,” ujar Indroyono.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa waktu tunggu di pelabuhan harus dipersingkat. Menurutnya, waktu tunggu yang lama memicu mahalnya ongkos logistik, yang berakibat pada daya saing industri. “Kita ingin industri tumbuh. Untuk naikkan itu, caranya adalah turunkan *cost of logistic*. Kita *cost of logistic* cukup mahal,” tegas Menteri Saleh Husin dalam sumber yang sama.

Catatan 6, Pemerintah RI telah menerbitkan PP Nomor 18 tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu. PP ini diyakini akan menjadi amunisi bagi investor di Indonesia. *Tax allowance* ini akan dinikmati oleh investor yang bergerak pada 143 bidang usaha.

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan keringanan pajak (*tax allowance*) yang baru saja diterbitkan melalui PP Nomor 18 tahun 2015 – berlaku efektif mulai 6 Mei 2015- merupakan salah satu langkah penting pemerintah untuk memasuki MEA 2015. PP Nomor 18 tahun 2015 ini sendiri merupakan revisi atas PP lama yang sejenis, yaitu PP Nomor 52 tahun 2011. Jika dalam PP lama hanya terdapat 129 bidang usaha yang dapat diskon pajak (*tax allowance*), maka dalam PP baru Nomor 18 tahun 2015 ini terdapat perluasan bidang usaha yang berhak memperoleh diskon pajak, yakni sebanyak 143 bidang usaha. PP baru ini dinilai akan menyegarkan iklim investasi di Indonesia. Dalam PP baru ini fasilitas yang diberikan untuk perusahaan antara lain ; **(Finance. detik. com, 30/04/2015)**.

1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun, 5 % per tahun.
2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.

3. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 % atau tarif lebih rendah.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Menurut Kepala Ekonom BNI, Ryan Kirayanto, sebagaimana dimuat dalam **SindoNews.com, 2 Mei 2015**, fasilitas *tax allowance* ini menurutnya patut diapresiasi, fasilitas ini dapat memberikan kemudahan investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia dan tidak terdoda untuk pindah ke negara lain. Menurut Ryan, fasilitas keringan pajak *tax allowance* ini harus pula diikuti dengan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi. Kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan kegiatan usaha investor lokal maupun asing. Sebaliknya pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakan ekonomi yang sudah dibuatnya.

PP Nomor 18 tahun 2015 ini dianggap berpihak kepada industri kecil dan menengah, sebab di dalamnya ada bidang usaha tertentu dan daerah tertentu, antara lain pertanian tanaman jagung, pertanian tanaman kedelai, pertanian padi, pertanian buah-buahan tropis, industri pembekuan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air bukan udang dalam kaleng dan industri pembekuan biota air lainnya yang berlokasi di daerah tertentu. Pemihakan ini dapat diartikan sebagai langkah pemerintah yang ingin menggerakkan industri kecil dan menengah pada sektor agrikultur dan maritim. Pada sektor ini diharapkan industri kecil dan menengah merebut pasar ASEAN. Persebaran industri kecil dan menengah ke berbagai daerah di wilayah Indonesia terlihat sebagai strategi pemerintah untuk lebih mengenalkan sekaligus melibatkan daerah dalam pasar MEA 2015, sehingga hal-hal yang dianggap sebagai *high cost* dalam produksi dapat dihilangkan. Dengan demikian pelaku industri kecil dan menengah juga akan bersanding sejajar dengan pelaku industri lain sejenis dari negara-negara ASEAN dalam berkompetisi.

Pentingnya Sinergitas

Meningkatkan daya saing industri Indonesia dalam MEA 2015 merupakan upaya kolektif yang harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat sebagai bagian dari pasar adalah simpul-simpul kolektif yang harus bersinergi dalam meningkatkan daya saing industri tersebut. Memasuki

MEA pada akhir tahun 2015 ini, Indonesia tidak mungkin menyerahkan urusan itu hanya kepada Pemerintah saja atau kepada para pelaku usaha saja. Atau tidak mungkin juga pemerintah memposisikan dan mensikapi masalah peningkatan daya saing industri ini secara *business as usual* belaka. Hal yang sama juga sikap para pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat.



Sampai sejauh ini, **Pemerintah** (baik pada masa pemerintahan SBY maupun awal pemerintahan Jokowi) sesungguhnya telah berbuat banyak untuk Indonesia dalam pasar bebas MEA 2015. Sebagai fasilitator, penyelia, pembuat kebijakan dan eksekutor, Pemerintah dapat dikatakan sudah optimal, meskipun di sana sini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Bahkan untuk jangka 2 hingga 3 tahun ke depan, Pemerintah masih saja dalam posisi *on going* mengebut sejumlah program pembangunan infrastruktur nasional. Ada pembangunan jalan tol, penambahan jalur rel, pembukaan baru atau perluasan port, penambahan dan pembukaan pembangkit tenaga listrik dan lain-lain. Kesemua pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini tentu akan berdampak positif langsung pada semakin meningkatnya daya saing industri Indonesia, paling tidak *production cost* industri itu terpankas dengan sendirinya. Dengan adanya ketersediaan infrastruktur yang kita ketahui merupakan salah satu indikator mengukur tingkat daya saing Industri suatu negara, maka diharapkan daya saing industri Indonesia menjadi lebih baik

atau paling tidak dapat sejajar dengan daya saing industri negara-negara lain anggota MEA. Pada posisi ini Pemerintah tergolong (+) dalam upaya meningkatkan daya saing industri tersebut, terutama menghadapi MEA 2015.

Secara faktual, harus diakui bahwa **Pemerintah Daerah** saat ini umumnya masih tergolong untuk tidak mengedepankan permasalahan peningkatan daya saing industri daerahnya sebagai sesuatu program yang prioritas Pemerintah daerah justru cenderung berkuat pada *local vision* nya masing-masing, artinya pemerintah daerah masih berorientasi pada upaya-upaya politik yang mementingkan daerahnya. Alih-alih memajukan industri lokal yang sesuai potensi daerahnya, Pemerintah Daerah justru sibuk dengan urusan mengelola kekuasaannya sendiri-sendiri. Secara sederhana saja misalnya dapat kita lihat dari inisiatif pemerintah daerah yang masih minim memetakan potensi industri daerahnya. Mayoritas *website* pemerintah daerah belum menyediakan laman tersendiri atau semacam pangkalan data menyangkut potensi industri daerahnya. Satu hal lagi yang teramat penting adalah mayoritas pemerintah daerah hanya berorientasi kepada optimalisasi PAD tanpa melakukan langkah-langkah inovatif dan diversifikatif terhadap industri lokalnya. Pada posisi ini, pemerintah daerah adalah pihak yang tergolong (-) dalam upaya meningkatkan daya saing industri, terutama memasuki pasar bebas MEA 2015 ini.

Selanjutnya, **Pelaku Usaha** menjadi variabel penting lainnya yang dinilai memiliki andil meningkatkan daya saing industri, terlebih untuk memasuki MEA 2015 yang tinggal sebentar lagi diberlakukan. Meskipun perannya sebagai operator sangat menentukan, tapi harus diingat para pelaku usaha ini sangat tergantung dengan dinamika perkembangan ekonomi politik yang mengiringinya, baik secara global, regional, nasional maupun lokal. Turbulensi ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan menjadi indikator yang kerap dipandang sangat mempengaruhi pelaku usaha dalam rangka upayanya menjalankan aktifitas produksinya. Optimalisasi produksi dan sejumlah langkah inovasi-inovasi produksinya bisa saja terhambat hanya karena persoalan-persoalan non-ekonomi. Dalam konteks peningkatan daya saing industri ini, para pelaku usaha tergolong berada dalam posisi yang senantiasa dilematik dan beresiko penuh (+ dan -). Tidak mengherankan bila kemudian pelaku usaha layak diberi sejumlah jaminan kepastian (hukum dan politik) berusaha dan sekaligus keringanan-keringanan berusaha.

Posisi **Masyarakat** menjadi variabel penting lainnya dalam sinergitas peningkatan daya saing industri. Masyarakat dalam hal ini adalah pangsa pasar itu sendiri yang berdiri bebas mengikuti arus pasar. Jika arus pasar bergerak kearah yang lebih condong memenuhi kehendak-kehendaknya, maka ia akan dengan sendirinya berjalan kearah tersebut, dan sebaliknya jika arus pasar bergerak kearah yang dinilainya tidak sesuai kehendaknya, maka ia akan dengan sendirinya mengalihkan jalannya sampai kearah yang sesuai kehendaknya. Inilah hukum pasar. Volume, harga dan mutu produk industri (barang maupun jasa), akan menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakatlah yang paling menentukan dinamika dan level kompetisi itu sendiri (+).

SIMPULAN

Di dalam perdagangan bebas yang dilakukan antara dua atau lebih negara terdapat prinsip tidak adanya hambatan dalam bentuk apapun bagi masuk dan keluarnya barang atau jasa ke negara-negara yang terlibat dalam bekerjasama tersebut. Setiap negara secara otomatis harus bersedia membuka pasar bagi negara lain dan pada saat yang sama negara yang membuka pasar terhadap negara lain, secara otomatis diberikan keleluasaan memasuki pasar yang berada diluar batas wilayah kedaulatannya. Pihak-pihak yang terlibat diharuskan memberikan tarif sebesar 0 persen terhadap bea masuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun demikian dalam prakteknya sampai sejauh ini tidak ada satu negara pun, khususnya negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Uni Eropa yang sepenuh hati mau membuka kran bagi kebebasan impor, walaupun mayoritas dari mereka berpandangan bahwa liberalisme akan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, dimana perdagangan bebas akan mendorong tumbuhnya konsumsi dan keuntungan. Sesungguhnya, perdebatan akan terus berlangsung antara para pendukung liberalisme di satu sisi dan proteksionisme di sisi lain seiring dengan maraknya pemberlakuan liberalisasi perdagangan internasional tersebut.

Demikian halnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN melalui skema MEA, maksudnya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa ASEAN. Kerjasama yang dikemas dalam MEA ini bukanlah perjanjian perdagangan bebas pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Sebelumnya sejumlah perjanjian

perdagangan bebas telah ditandatangani secara bersama oleh pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak lain, diantaranya adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA), ASEAN-Korea Selatan Free Trade Agreement (FTA), Indonesia-Japan Partnership Agreement (IJPA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Dalam kaitan ini, Indonesia sesungguhnya sudah sangat berpengalaman menjalin hubungan perdagangan internasional yang berbasis *free trade*. Oleh sebab itu MEA yang akan diberlakukan akhir tahun 2015 ini haruslah dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sebagaimana prinsip yang terkandung dalam perdagangan bebas, dimana pihak-pihak yang terlibat diharuskan memberikan tarif sebesar 0 persen terhadap bea masuk barang atau jasa yang diperdagangkan, maka kompetisi atau persaingan diantara para pelaku usaha menjadi tidak dapat dihindarkan. Yang dikompetisikan bukan hanya aspek perdagangannya saja melainkan juga aspek produksinya. Negara dengan aspek pengelolaan Industrinya kurang baik dapat dipastikan akan tertinggal dan kalah. Sebaliknya, negara dengan aspek pengelolaan Industrinya baik dapat dipastikan akan cenderung lebih maju dan memenangkan pasar. Dalam kondisi yang demikian ini maka daya saing industri mutlak dikedepankan oleh semua pihak yang terlibat dalam aktifitas perdagangan bebas tersebut.

1. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri Indonesia memasuki pasar bebas MEA 2015, Pemerintah harus secara terus menerus melakukan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur yang dianggap prioritas dan relevan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara terus menerus ini diyakini akan dapat meminimalisasi inefisiensi. Dengan semakin tereduksinya inefisiensi, maka produk industrinya cenderung akan lebih kompetitif ditengah-tengah pasar.
2. Pemerintah RI sesungguhnya tidak perlu harus secara ketat mengikuti paradigma liberalisasi pasar, karena di dalam praktek liberalisasi pasar tidak diharamkan bagi pemerintah untuk bersikap proteksionis. Terlebih bilamana sikap itu bertautan erat dengan nilai dan kepentingan domestiknya yang paling mendasar. Dalam sejarah perdagangan bebas dunia, selalu saja ditemukan komoditi tertentu yang dibebankan tarif atas barang atau jasa yang diperdagangkan, baik secara formal maupun informal.

3. Pemerintah dan pelaku usaha haruslah memiliki fokus dan paradigma serta langkah yang sama atas pemilihan komoditi dan jenis komoditi potensial yang ditargetkan daya saing industrinya dapat meningkat. Sehingga bila disandingkan dengan produksi negara lain nantinya tidak kalah saing, sekurang-kurangnya bernilai sejajar ditengah-tengah pasar.
4. Kecerdasan membaca peluang pasar oleh semua pihak yang terlibat dalam aktifitas pasar bebas menjadi bagian lain yang tidak kalah penting dalam upaya memanfaatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari skema MEA tersebut. Menggenjot produksi dalam volume yang besar adalah tindakan yang diwajibkan dalam skema pasar bebas, namun demikian jika produksi yang dihasilkan dalam volume yang besar itu tidak memiliki nilai kompetitif, apalagi tidak tepat sasaran, maka pasar akan cenderung menolaknya.
5. Masyarakat perlu mendapat informasi-informasi menyeluruh terkait dengan skema MEA dan semua hal yang ditimbulkannya dari perspektif yang multidimensional. Masyarakat harus secara terus menerus mengetahui dan memahaminya. Yang lebih utama adalah memberi penyadaran-penyadaran komprehensif agar masyarakat tidak mengambil posisi sebagai pemain pasif, melainkan mendorongnya untuk berperan secara aktif, dengan demikian makna pasar bebas MEA bagi masyarakat akan dengan sendirinya bergeser dari dimensi musibah menjadi dimensi berkah.
6. Dalam konteks MEA, Pemerintah Daerah sebaiknya tidak lagi boleh berpikir dan bertindak sempit dan lokal. Urusan-urusan mempertahankan kepentingan politik, wibawa dan kekuasaan yang selama ini cenderung melekat dalam keseharian pemerintahan politik lokal di Indonesia, sudah sepatutnya mulai dikurangi dan mengalihkannya kepada urusan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, condong pada upaya memajukan perekonomian daerahnya dengan cara dan tata kelola yang lebih profesional, inovatif dan berdimensi *entrepreneurship* tanpa keluar dari koridor aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, 2011).

SindoNews.com 16 Desember 2014

SindoNews.com, 12 Januari 2015

SindoNews.com, 23 Feburari 2015

SindoNews.com, 15 April 2015

SindoNews.com 22 April 2015

SindoNews.com, 2 Mei 2015

Liputan 6.com, Jakarta 16/3/2015

Media Industri, No.02.2013

Jawapos.com, 30/04/15

Business Review, Mei 01, 2015

Finance.detik.com, 30/04/2015

www.oecd.org

www.kemenkeu.go.id

www.weforum.org

www.dpr.go.id